

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- A'an Efendi, Freddy Poernomo. 2017. *Hukum Administrasi*. Sinar Grafika. Jakarta.
- Amiruddin dan H. Zainal Asikin. 2014. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Rajawali Pers. Jakarta.
- Amran Suadi. 2021. *Sistem Pengawasan Badan Peradilan di Indonesia*. PT RajaGrafindo Persada. Jakarta
- Anggar Sigit Pamukti dan Meylani Chahyaningsih. 2016. *Pengawasan Hukum Terhadap Aparatur Negara*. Pustaka Yustisia. Yogyakarta.
- A.M. Yunus Wahid. 2014. *Pengantar Hukum Tata Ruang*. Prenadamedia Group. Jakarta.
- A.M. Yunus Wahid. 2018. *Pengantar Hukum Lingkungan*. Prenadamedia Group. Jakarta.
- Bambang Sunggono. 2013. *Metodologi Penelitian Hukum*. Rajawali Pers. Jakarta.
- Hadi Sabari Yunus. 2005. *Struktur Tata Ruang Kota*. Pustaka Belajar Offset. Yogyakarta.
- Hasni. 2010. *Hukum Penataan Ruang dan Penatagunaan Tanah*. PT Raja Gravindo Persada. Jakarta.
- Maret Priyanta. 2018, *Pengelolaan Hutan Berkelanjutan dalam Kerangka Pembaruan Sistem Hukum Lingkungan dan Tata Ruang Berbasis Perubahan Iklim*. Logoz Publishing. Jakarta.
- Myrna A.Safitri. 2021. *Hukum Tata Ruang dalam Diskursus Media*. Media Sains Indonesia. Bandung
- Ni'matul Huda. 2015. *Hukum Tata Negara Indonesia*. Raja Grafindo Jakarta.
- Huda. 2007. *Pengawasan Pusat Terhadap Daerah*. Raja Grafindo Yogyakarta
- en Sinamo. 2010. *Hukum Administrasi Negara*. Jala Permata Aksara. Jakarta.



Sirajuddin Didik Suriono Winardi. 2011. *Hukum Pelayanan Publik*. Setara Pers. Malang.

Waskito dkk. 2017. *Pertanahan Agraria dan Tata Ruang*. Kencana. Jakarta

Wisnu Arya Wardhana. 2004. *Dampak Pencemaran Lingkungan*. Andi Yogyakarta. Yogyakarta.

JURNAL

Budi Retna Sumardjito. 2012. *Pola Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau Pada Kawasan Perkampungan Plemburan Tegal Ngakglik Slema*. Jurnal Teknik Sipil dan Arsitektur. Vol. VIII No.1. Mei 2012.

Dea Ardhianta. 2016. *Efektifitas Opersional Pengawasan Pendirian Bangunan oleh Dinas Tata Ruang dan Bangunan Kota Pekanbaru*. Jurnal Online Mahasiswa FISIP. Vol. 3 No.1. Februari 2016.

Samsudi. 2010. *Ruang Terbuka Hijau Tata Ruang Perkotaan Kota Surakarta*. Jurnal Rural & Development. Vol. 1 No.1 Februari 2010.

Skripsi

Bima Satrio Husodo. 2013. *Pengawasan Ruang Terbuka Hijau Sebagai Kawasan Perumahan Menurut Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 06 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Madiun 2010-2030*. Skripsi. Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.

Suhail Ahmad. 2016. *Aspek Hukum Pemenuhan Ruang Terbuka Hijau di Kota Makassar*. Skripsi. Sarjana Hukum. Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar.

Sari Siti Annisa Aulia. 2016. *Peran Dinas Tata Ruang dan Bangunan dalam Mengawasi Penyalahgunaan Ruang Terbuka Hijau di Kota Medan*. Skripsi. Sarjana Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Medan



Website

Erwin Hutapea. 2019. Dalam Berita Online Kompas tertanggal 26 Januari 2019. <https://properti.kompas.com/read/2019/01/26/133640621/temuan-kementerian-atr-3-daerah-di-sulsel-melanggar-tata-ruang>

Vivi Riski Indriani. 2021. Dalam Berita *Online SindoNews* tertanggal 4 Maret 2021. <https://makassar.sindonews.com/read/353660/711/imb-disoal-proyek-pembangunan-twin-tower-diminta-dihentikan-1614819823>

Perundang-Undangan dan Peraturan Pemerintahan

Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang No. 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang

Peraturan Daerah Kota Makassar No. 5 Tahun 2004 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Makassar 2015-2034.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau di Wilayah Perkotaan.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pedoman Perencanaan Kawasan Perkotaan.

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 05/PRT/M/2008 Tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan.

Peraturan Walikota Kota Makassar No. 25 Tahun 2014 Tentang Penertiban Bangunan

Peraturan Walikota Kota Makassar No. 69 Tahun 2016 Tentang Izin Pemanfaatan, Penataan dan Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau.

Peraturan Walikota Kota Makassar Nomor 71 Tahun 2019 Tentang Penataan dan Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau di Kota Makassar



LAMPIRAN



Optimized using
trial version
www.balesio.com



SURAT KETERANGAN PENELITIAN
Nomor: 070/2633/SKP/SB/DPMPSTP/6/2024

DASAR:

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penerbitan Keterangan Penelitian.
- Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah
- Peraturan Walikota Nomor 4 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berbasis Resiko, Perizinan Non Berusaha dan Non Perizinan
- Keputusan Walikota Makassar Nomor 954/503 Tahun 2023 Tentang Pendelegasian Kewenangan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko, Perizinan Non Berusaha dan Non Perizinan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Makassar Tahun 2023
- Surat Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Selatan nomor 15514/S.01/PTSP/2024, Tanggal 14 Juni 2024
- Rekomendasi Teknis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Makassar nomor 2633/SKP/SB/BKBP/6/2024

Dengan Ini Menerangkan Bahwa :

Nama : MELANI PUTRIANI TANGKE LANGI
NIM / Jurusan : B021171309 / Hukum Administrasi Negara
Pekerjaan : Mahasiswa (S1) / Universitas Hasanuddin Makassar
Alamat : Jl. P. Kemerdekaan Km. 10, Makassar
Lokasi Penelitian : Terlampir,-
Waktu Penelitian : 19 Juni 2024 - 19 Juli 2024
Tujuan : Skripsi
Judul Penelitian : PENGAWASAN DINAS SOSIAL TERHADAP PENYALURAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT) DI KOTA MAKASSAR

Dalam melakukan kegiatan agar yang bersangkutan memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- Surat Keterangan Penelitian ini diterbitkan untuk kepentingan penelitian yang bersangkutan selama waktu yang sudah ditentukan dalam surat keterangan ini.
- Tidak dibenarkan melakukan penelitian yang tidak sesuai / tidak ada kaitannya dengan judul dan tujuan kegiatan penelitian.
- Melaporkan hasil penelitian kepada Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Makassar melalui email bidangekosobudkesbangpolmks@gmail.com.
- Surat Keterangan Penelitian ini dicabut kembali apabila pemegangnya tidak menaati ketentuan tersebut diatas.



Ditetapkan di Makassar

Pada tanggal: 2024-06-20 14:44:25



Ditandatangani secara elektronik oleh
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA MAKASSAR

HELMY BUDIMAN, S.STP., M.M.



Tembusan Kepada Yth:

- Pimpinan Lembaga/Instansi/Perusahaan Lokasi Penelitian;
- Peringgal,-